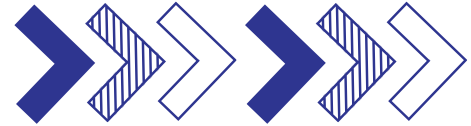




2026

RENJA POKOK



**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno – Hatta Desa Puncak Indah
M A L I L I, 92981

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
NOMOR : 100.3.3/ 72 / KesbangPol

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan pemerintahan daerah, administrasi keuangan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu menetapkan Surat Keputusan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 melalui Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 91);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 13);

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA TAHUN 2026

KESATU : Membentuk tim penyusun Rencana Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim penyusun Rencana Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas dalam perumusan dan penyusunan Renja 2026;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 01 September 2025
Kepala Badan,



GUNTUR HAFID, S.Pd.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19710502 199208 1 001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Peninggal.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL) TAHUN 2026**

Penanggung Jawab : Kepala Badan Kesbangpol
Ketua : Sekretaris Badan Kesbangpol
Sekertaris : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Anggota :

1. Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
2. Kabid. Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
3. Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
4. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
5. Staf Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Ditetapkan di: Malili
Pada tanggal: 01 September 2025
Kepala Badan,



GUNTUR HAFID, S.Pd.M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19710502 199208 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yang kemudian diperjelas kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan guna menjaga konsistensi dan sinergitas program dan kegiatan sehingga dapat dengan optimal mendukung proses pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Pemahaman yang cermat terhadap program-program prioritas dan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun langkah-langkah yang diperlukan, akan menghasilkan Renja yang bukan saja akan lebih berkualitas dan implementatif, tetapi lebih jauh lagi akan bermanfaat bagi penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

Mallu, 01 September 2025
Kepala Badan,

GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si
Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP. 19710502 199208 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.	
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
TAHUN 2025.....	10
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra..	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik.....	28
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	40
BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	42
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	44
BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN	
POLITIK.....	48
BAB. V. PENUTUP.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan bangsa dan Politik dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai Triwulan IV..	11
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol.....	27
Tabel 2.3.	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....	30
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan KesbangPol.....	42
Tabel 3.2.	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	44
Tabel 4.1.	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Rumusan Rencana Tahun 2027.....	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri wajib membuat perencanaan dalam setiap tahunnya yang tertuang dalam rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dokumen perencanaan yang wajib dan ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai Dokumen operasional tahunan atau jangka pendek. Selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai stakeholder dengan berpedoman pada RPJMD menyusun Renstra dan Renja .

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah dokumen perencanaan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan politik, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari program Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.

Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2026 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 112);

16. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
17. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 168);
 33. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2);
 34. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 35. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RENJA-PD adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam rangka penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta memudahkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya RENJA-PD adalah :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum khususnya Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 (satu) tahun anggaran melalui : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya dan Program Peniingkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial.
2. Memantapkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan peran serta berpolitik.
4. Meminimalkan terjadinya konflik sosial dalam rangka menjaga kondusifitas Kabupaten Luwu Timur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini dijelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pada bagian ini diuraikan mengenai rencana kerja yang diusulkan serta jumlah dan sumber pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan serta Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2026

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugasnya yakni melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. dalam menjalankan urusan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2026 melaksanakan 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran yang dikelola sebesar **Rp. 38,925,894,209,-** (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dengan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar **Rp. 38,641,742,074,-** (tiga puluh delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah) atau 99,27% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 284,152,135,- (dua ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) atau 0,73%, masih terdapat sisa anggaran disebabkan karena anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN dipersiapkan untuk penggajian 2 bulan (Nopember dan desember 2024) kepada 2 orang P3K pelantikan April 2024, namun sampai bulan desember proses penggajian untuk seluruh P3K pelantikan April 2024 masih tetap di BKAD Kabupaten Luwu Timur. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, sisa anggaran ini adalah potongan denda keterlambatan atau ketidakhadiran ASN dan untuk belanja makan dan minum dikarenakan adanya penawaran belanja melalui e-catalog. Belanja modal kendaraan dinas (2 unit motor) sebesar Rp. 58.290.000 tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya arahan efisiensi anggaran tahun 2024. Belanja modal kendaraan bermotor penumpang (sisa anggaran administrasi proyek) tidak direalisasikan sesuai dengan target dikarenakan anggaran tersebut adalah anggaran yang dipersiapkan untuk melakukan pengecekan unit mobil dimakassar, akan tetapi setelah dilakukan komunikasi dengan penyedia unit kendaraan dapat dilakukan pengecekan fisiknya di daerah (Malili). Adapun hasil pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan IV

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi (2024)Perubahan								Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota					97	4.657.567.679	84,37	307.781.162	94,24	2.193.611.115	-	613.728.881	-	1.322.600.186	98,60	4.477.121.344	101,65%	96,13%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu					100	58.859.003	100	6.144.450	100	27.383.900	100	6.279.000	100	14.986.200	100,00	54.793.550	100,00%	93,09%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah					2	36.692.300	0	3.135.600	1	14.399.900	1	5.252.000	-	11.538.800	2	34.326.300	100,00%	93,55%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD					2	5.017.400	0	-	-	1.392.000	2	1.027.000	-	2.092.000	2	4.511.000	100,00%	89,91%

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah					10	17.149.303	4	3.008.850	2	11.592.000	2	-	2	1.355.400	10	15.956.250	100,00%	93,04%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik					100	1.999.260.181	100	233.489.287	100	812.087.043	100	427.640.315	100	494.532.343	100,00	1.967.748.988	100,00%	98,42%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					14	1.907.958.581	14	228.763.437	14	783.433.043	14	403.035.315	14	463.031.043	14	1.878.262.838	100,00%	98,44%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD					18	91.301.600	5	4.725.850	4	28.654.000	5	24.605.000	4	31.501.300	18	89.486.150	100,00%	98,01%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar					100	1.619.900	100	793.900	100	705.500	100	-	100	-	100,00	1.499.400	100,00%	92,56%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD					4	1.619.900	1	793.900	1	705.500	1	-	1	-	4	1.499.400	100,00%	92,56%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah					100	88.002.100	100	3.647.500	100	23.404.450	100	7.522.850	100	41.920.500	100,00	76.495.300	100,00%	86,92%
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian					4	35.642.100	1	1.987.500	1	7.922.950	1	5.307.850	1	19.605.500	4	34.823.800	100,00%	97,70%

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan					6	52.360.000	1	1.660.000	3	15.481.500	1	2.215.000	1	22.315.000	6	41.671.500	100,00%	79,59%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah					100	553.101.495	95	45.314.367	85,71	161.177.386	100	142.117.503	100	176.207.715	97,14	524.816.971	97,14%	94,89%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					4	4.534.590	1	822.936	1	998.274	1	-	1	2.691.690	4	4.512.900	100,00%	99,52%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan					5	62.000.000	2	-	-	17.500.000	1	14.500.000	1	2.000.000	4	34.000.000	80,00%	54,84%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan					4	12.231.905	1	2.156.489	1	2.932.839	1	-	1	7.138.043	4	12.227.371	100,00%	99,96%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					4	18.014.750	1	300.000	1	5.313.600	1	1.440.000	1	10.961.150	4	18.014.750	100,00%	100,00%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan					60	8.040.000	15	1.040.000	15	1.640.000	15	1.740.000	15	3.420.000	60	7.840.000	100,00%	97,51%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu					4	11.495.000	1	-	1	4.493.600	1	2.027.600	1	4.915.500	4	11.436.700	100,00%	99,49%

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12	436.785.250	3	40.994.942	3	128.299.073	3	122.409.903	3	145.081.332	12	436.785.250	100,00%	100,00%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD perangkat daerah penunjang yang terpenuhi					100	1.736.600.000	50	-	100,00	1.091.589.000	-	750.000	100	540.250.000	91,67	1.671.989.000	91,67%	96,28%
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)					6	1.566.440.000	0	-	2	964.700.000	-	750.000	2	540.250.000	4	1.505.700.000	66,67%	96,12%
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)					34	24.100.000	0		34	24.100.000	-	-	-	-	34	24.100.000	100,00%	100,00%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)					3	41.000.000	0		1	29.400.000	-	-	2	10.000.000	3	39.400.000	100,00%	96,10%
		Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)					2	105.060.000	2		-	102.789.000	-	-	-	-	2	102.789.000	100,00%	97,84%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)					100	85.600.000	100	11.481.658	100	24.893.836	100	15.811.713	100	25.325.928	100	77.513.135	100,00%	90,55%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)					4	1.000.000	1	-	1	540.500	1	359.500	1	38.100	4	938.100	100,00%	93,81%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)					4	42.000.000	1	8.481.658	1	10.353.336	1	5.252.213	1	11.687.828	4	35.775.035	100,00%	85,18%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)					4	42.600.000	1	3.000.000	1	14.000.000	1	10.200.000	1	13.600.000	4	40.800.000	100,00%	95,77%

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pambauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter kebangsaan, pambauran kebangsaan, bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan (orang)					60	22.880.900	-	1.917.000	-	4.244.100	-	4.575.800	-	3.115.200	-	13.852.100	0,00%	60,54%	
		Pembentukan Paskibraka	Jumlah paskibraka (orang)					70	1.273.334.400	-	30.493.228	-	32.346.893	70	1.177.364.200	-	19.736.680	70	1.259.941.001	100,00%	98,95%	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		98,23%	98,27%
																			Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan etika serta budaya politik					100	30.816.266.720	0	48.562.500		28.464.822.430	100	510.604.090		1.765.013.414	100	30.789.002.434	100,00%	99,91%	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitas kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah					100	30.816.266.720	100	48.562.500	-	28.464.822.430	-	510.604.090	-	1.765.013.414	25	30.789.002.434	25,00%	99,91%	

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah (orang)					446	589.977.460	41	9.665.160	-	218.539.900	275	111.901.800	30	206.127.700	346	546.234.560	77,58%	92,59%			
																					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	77,58%	92,59%	
																						Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Tinggi
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial					100	1.507.346.450	100	14.390.000	100	293.564.600	100	600.680.400		588.030.000	100	1.496.665.000	100,00%	99,29%			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social					100	1.507.346.450	100	14.390.000	-	293.564.600	-	600.680.400	-	588.030.000	100	1.496.665.000	100,00%	99,29%			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjas ama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah (orang)					300	1.470.989.750	115	9.960.000	-	279.716.600	140	592.071.000	45	579.790.000	300	1.461.537.600	100,00%	99,36%			

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah (laporan)					4	36.356.700	1	4.430.000	1	13.848.000	1	8.609.400	1	8.240.000	4	35.127.400	100,00%	96,62%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100,00%	99,29%			
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
								38.925.769.209			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								98,23%	99,26%			
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			

Dari evaluasi hasil pelaksanaan renja yang disajikan pada tabel Tabel 2.1 diatas dapat didefinisikan bahwa realisasi pelaksanaan program, kegiatan & sub kegiatan secara umum dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi, anggaran sebesar Rp. 58,859,003,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV Rp. 54,793,550,- atau 93,09% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 100%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,999,260,181,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV Rp. 1,967,748,988,- atau 98,42% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 100%.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.619,900,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV Rp. 1,499,400,- atau 92,56% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 100%.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88,002,100,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV Rp. 76,495,300,- atau 86,92% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 100%.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 553,101,495,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV Rp. 524,816,971,- atau 94,89% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 97,14%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,736,600,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV Rp. 1,671,989,- atau 96,28% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 91,67%.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85,600,000,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV Rp. 77,513,135- atau 90,55% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 100%

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 134,525,000,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV Rp. 102,265,00,- atau 76,02% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 100%.

II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,296,215,300,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV Rp. 1,273,793,101,- atau 98,27% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 0,80%.

III. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30,816,266,720,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV Rp. 30,789,002,434,- atau 99,91% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 25%.

IV. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58,395,600,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV Rp. 53,924,300,- atau 92,34% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 16,35%.

V. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 589,977,460,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV Rp. 546,234,560,- atau 92,59% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 25%.

VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,507,346,450,- dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV Rp. 1,496,665,000,- atau 99,29% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 77,58%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi terhadap kehidupan politik dan meningkatkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan yang kondusif dalam lingkungan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, yang dipimpin oleh kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan indikator kinerja kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2025-2029.

Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

A. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang pembentukan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

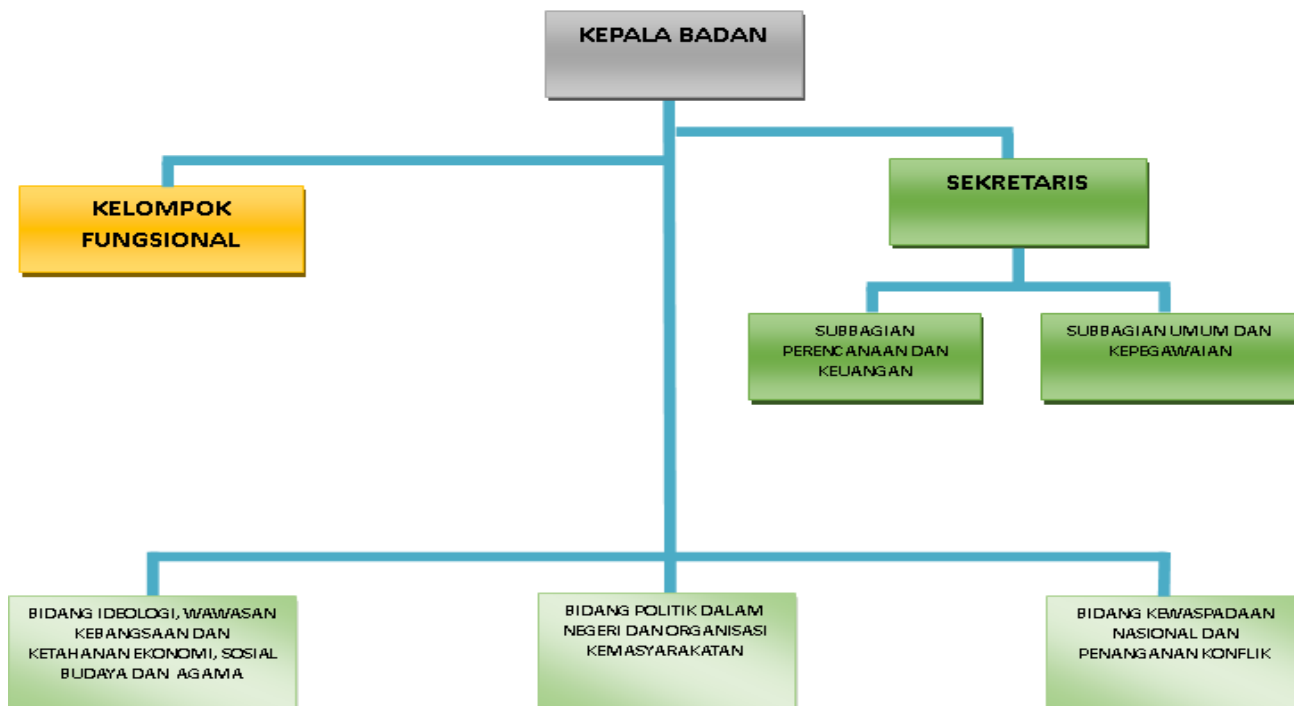
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksana kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kota;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik daerah;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

C. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menurut Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol



Dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dijelaskan bahwa struktur organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 1 (satu) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Badan, yang dibantu oleh 4 (empat) pejabat administrator, 2 (dua) pejabat pengawas dan kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, Terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;

- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Setiap unit dalam struktur tersebut memiliki uraian tugas dan fungsi yang spesifik untuk memastikan seluruh aspek kesatuan bangsa dan politik dapat berjalan secara sinergis dan terkoordinasi.

Analisis pencapaian indikator Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Renstra 2025 - 2029
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Realisasi Capaian						Proyeksi					Catatan Analisis	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028		2029
1	2	3	4	5	6				7	8	9					10	11				
1	Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	0%	18,18 %	27,27 %	36,36 %	54,55 %	63,64 %	73,73 %	-	-	-	-	-	-	18,18 %	27,27 %	36,36 %	54,55 %	63,64 %	73,73 %	
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam PEMILU dan PILKADA	80,35%	80,35 %	80,35 %	80,35 %	80,35 %	81,50 %	81,50 %	-	-	-	-	-	-	80,35 %	80,35 %	80,35 %	80,35 %	81,50 %	81,50 %	
3	Persentase Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah	50%	52%	54%	56%	59%	61%	63%	-	-	-	-	-	-	52%	54%	56%	59%	61%	63%	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,65 (BB)	70,00 (BB)	70,50 (BB)	71,00 (BB)	71,50 (BB)	72,00 (BB)	72,50 (BB)	-	-	-	-	-	-	70,00 (BB)	70,50 (BB)	71,00 (BB)	71,50 (BB)	72,00 (BB)	72,50 (BB)	

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa :

Indikator dan capaian target capaian kinerja setiap tahun Badan Kesbangpol untuk tahun 2025-2029, beserta indikator kinerja, baseline tahun 2025. Tujuan utamanya adalah " Meningkatkan kerukunan umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi". Untuk mencapainya, ditetapkan beberapa sasaran terukur, antara lain:

- ❖ Menurunkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (IPOLEKSOSBUD) secara bertahap dari 18,18% tahun 2025 menjadi 73,73% pada tahun 2030
- ❖ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam PEMILU dan PILKADA dari 80,35% pada tahun 2024 menjadi 81,50% pada tahun 2029
- ❖ Meningkatkan Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah secara bertahap dari 52% pada tahun 2025 menjadi 63% pada tahun 2030
- ❖ Meningkatkan nilai SAKIP Kesbangpol secara bertahap dari 70,00 (BB) Tahun 2025 menjadi 72,50 (BB) pada tahun 2030

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsinya, masalah-masalah yang akan dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimasa yang akan datang yaitu :

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya antara lain sebagai berikut :
 - a. belum optimalnya pemahaman, kesadaran dan pengamalan terhadap 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di Masyarakat;
 - b. belum terbentuknya Lembaga teknis pusat pendidikan kebangsaan;
 - c. adanya kesenjangan antar etnik/etnis/suku yang ada di wilayah kabupaten luwu timur;
 - d. belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan tentang pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat

adikatif lainnya kepada tokoh masyarakat maupun generasi muda dan pelajar di kabupaten luwu timur.

2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan antara lain sebagai berikut :

- a. masih terbatasnya Pendidikan politik pada Masyarakat dan generasi muda;
- b. kurangnya kesadaran pengurus parpol penerima bantuan keuangan dalam penyelesaian administrasi bantuan keuangan parpol.
- c. belum maksimalnya pelaksanaan monev terhadap keberadaan ormas, parpol dan LSM di wilayah kabupaten luwu timur.

3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik antara lain sebagai berikut :

- a. adanya gesekan antar masyarakat maupun kelompok masyarakat yang dilatar belakangi oleh perbedaan suku, ras dan agama;
- b. masih kurangnya koordinasi antar Lembaga sectoral di bidang kewaspadaan dini;
- d. adanya kelompok-kelompok atau organisasi yang membawa paham – paham radikal yang menimbulkan konflik di masyarakat;
- e. masih adanya warga negara asing yang keluar masuk di wilayah kabupaten luwu timur tanpa memiliki data yang lengkap.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan tingkat kinerja yang dicapai SKPD, dengan arahan Kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang diusulkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada rancangan awal RKPD tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Belanja Operasi				7.837.888.329		Belanja Operasi				7.837.888.329
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.974.068.664,00	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100 %	2.974.068.664,00
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	73.176.803,00	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	73.176.803,00
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok	45.077.500	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok	45.077.500
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dok	5.518.000	b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dok	5.518.000
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 Dok	5.518.000	c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 Dok	5.518.000
d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Lap	19.943.803.	d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Lap	19.943.803.
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	2.267.002.061	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	2.267.002.061
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 Orang	2.215.978.561	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 Orang	2.215.978.561

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKP					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18 Lap	51.023.500	b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18 Lap	51.023.500
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100 %	18.053.000	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100 %	18.053.000
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Lap	18.053.000	a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Lap	18.053.000
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktakhirkan	100 %	72.760.000	4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktakhirkan	100 %	72.760.000
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Badan KesbangPol	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	24 Stel	18,350,000	a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Badan KesbangPol	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	24 Stel	18,350,000
b	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dok	41.132.000	b	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dok	41.132.000
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	4 Orang	31.628.000	c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	4 Orang	31.628.000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata - rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %	312.256.800	5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata - rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %	312.256.800

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKP					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan KesbangPol	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	20.270.000	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan KesbangPol	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	20.270.000
b	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Badan KesbangPol	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	73.000,000	b	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Badan KesbangPol	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	73.000,000
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan KesbangPol	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	4 Paket	8.608.600	c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan KesbangPol	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	4 Paket	8.608.600
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan KesbangPol	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	12.390.000,00	d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan KesbangPol	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	12.390.000,00
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Dok	8.040.000,00	e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Dok	8.040.000,00
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan KesbangPol	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Lap	11.220.000,00	f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan KesbangPol	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Lap	11.220.000,00
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Lap	178.728.200,00	g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Lap	178.728.200,00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100 %	26.400.000,00	6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100 %	26.400.000,00
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan KesbangPol	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 -	-	a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan KesbangPol	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 -	-
b	Pengadaan Mebel	Badan KesbangPol	Jumlah paket mebel yang disediakan	30 Unit	26.400.000,00	b	Pengadaan Mebel	Badan KesbangPol	Jumlah paket mebel yang disediakan	30 Unit	26.400.000,00

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 Unit	0,00	c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 Unit	0,00
d	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	- Unit	-	d	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	- Unit	-
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata - rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	106.670.000,00	7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata - rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	106.670.000,00
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Lap	1.610.000,00	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Lap	1.610.000,00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Lap	43,500,000	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Lap	43,500,000
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Lap	61.560.000,00	c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan KesbangPol	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Lap	61.560.000,00
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	97.750.000,00	8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	97.750.000,00
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan KesbangPol	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	24.000.000,00	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan KesbangPol	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	24.000.000,00
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	27 Unit	33.250.000,00	b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	27 Unit	33.250.000,00

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah gedung kantor & bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	27.500.000,00	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan KesbangPol	Jumlah gedung kantor & bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	27.500.000,00
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Badan KesbangPol	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	13.000.000,00	d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Badan KesbangPol	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	13.000.000,00
II	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	1.659.221.800,00	II	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	1.659.221.800,00
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase capaian pelaksanaan koordinasi di bidang ideology wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	100 %	1.659.221.800,00	1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase capaian pelaksanaan koordinasi di bidang ideology wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	100 %	1.659.221.800,00
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	100 Orang	53.928.800,00	a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	100 Orang	53.928.800,00
b	Pembentukan Paskibraka	Badan KesbangPol	Jumlah Paskibraka	70 Orang	1.605.293.000,00	b	Pembentukan Paskibraka	Badan KesbangPol	Jumlah Paskibraka	70 Orang	1.605.293.000,00

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	1.241.440.265,00	III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	1.241.440.265,00
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase capaian peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	1.241.440.265,00	1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase capaian peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	1.241.440.265,00
a	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	1 Dok	57.821.000,00	a	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah dokumen program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	1 Dok	57.821.000,00

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKP					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
b	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	86 Orang	1.153.922.265,00	b	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	86 Orang	1.153.922.265,00
c	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	4 Lap	29.697.000,00	c	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	4 Lap	29.697.000,00
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100 %	41.120.500,00	IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100 %	41.120.500,00

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKP					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	108 Kelompok	41.120.500,00	1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	108 Kelompok	41.120.500,00
a	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	4 Lap	41.120.500,00	a	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	4 Lap	41.120.500,00
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	95 %	554.051.000,00	V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	95 %	554.051.000,00
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta kerukunan umat beragama	100 %	554.051.000,00	1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta kerukunan umat beragama	100 %	554.051.000,00
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	400 Orang	554.051.000,00	a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	400 Orang	554.051.000,00

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKP					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 %	1.367.986.100,00	VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 %	1.367.986.100,00
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100 %	1.367.986.100,00	1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100 %	1.367.986.100,00
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	464 Orang	185.167.100,00	a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	464 Orang	185.167.100,00

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKP					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
b	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	4 Lap	26.617.500,00	b	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan KesbangPol	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	4 Lap	26.617.500,00
c	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Badan KesbangPol	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.156.201.500,00	c	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Badan KesbangPol	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.156.201.500,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 mengakomodir program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, Ormas, LSM, OKP maupun dari hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari pemantauan lapangan pada pelaksanaan musrembang kecamatan. Namun secara umum tidak ada usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat pada kegiatan musrembang dan forum organisasi perangkat daerah untuk tahun 2026 yang berhubungan langsung dengan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang berkarakter dalam koridor NKRI dengan lebih meningkatkan pembinaan pemahaman wawasan kebangsaan dalam rangka mengurangi atau menurunkannya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan social serta menjaga stabilitas politik di daerah.

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019, pasal 6 ayat 2 yaitu :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional

- dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka tujuan dan sasaran semua perangkat daerah haruslah menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2026 sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra, dimana **tujuan** yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2025-2029 yakni :

a. Tujuan

1. Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

b. Sasaran

1. Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah.
2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam PEMILU dan PILKADA.
3. Meningkatnya Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah.
4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Target Capaian
1	2	3	4	6
1	Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi	1. Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD	1. Meningkatnya stabilitas dan kondusivitas daerah	27,27%
		2. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam PEMILU dan PILKADA	2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam PEMILU dan PILKADA	80,35%
		3. Persentase Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah	3. Meningkatnya Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah	54%
		4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,50 (BB)

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2026 merupakan kelanjutan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2025.

Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2026 adalah sebanyak 6 (enam) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2026

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
			4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
		3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			9 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			11 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
			12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			13 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			15 Fasilitasi Kunjungan Tamu
			16 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			18 Pengadaan Mebel
			19 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			20 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			22 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			23 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			25 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			26 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			27 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	9 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	28 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	10 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	29 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	30 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
			31 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	11 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	32 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	12 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	33 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	13 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	34 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			<p>35 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>36 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</p>

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara detail tercantum dalam lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026
Dan Rumusan Rencana Tahun 2027

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2		3	5	6	5	6
	Belanja Operasi				7.837.888.329		9.424.350.349
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota		100 %	2.974.068.664,00	100 %	4.026.200,184
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		100 %	73.176.803,00	100 %	75,353,003
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Badan KesbangPol	2 Dok	45.077.500	3 Dok	38,392,300
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Badan KesbangPol	2 Dok	5.518.000	2 Dok	4,492,400

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Badan KesbangPol	2 Dok	5.518.000	2 Dok	5.518.000
d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Badan KesbangPol	10 Lap	19.943.803.	10 Lap	32,468,303
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik		100 %	2.267.002.061	100 %	1,986,362,901
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Badan KesbangPol	17 Orang	2.215.978.561	14 Orang	1,895,421,301
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Badan KesbangPol	18 Lap	51.023.500	18 Lap	90,941,600
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar		100 %	18.053.000	100 %	8,139,900
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Badan KesbangPol	4 Lap	18.053.000	4 Lap	8,139,900
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktakhirkan		100 %	72.760.000	100 %	92.760.000
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Badan KesbangPol	24 Stel	18,350,000	0 -	-

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
b	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Badan KesbangPol	4 Dok	41.132.000	4 Dok	51.132.000
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Badan KesbangPol	4 Orang	31.628.000	11 Orang	41.628.000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata - rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah		100 %	312.256.800	100 %	454.256.800
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Badan KesbangPol	4 Paket	20.270.000	4 Paket	30.270.000
b	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Badan KesbangPol	3 Paket	73.000,000	5 Paket	83.000,000
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	Badan KesbangPol	4 Paket	8.608.600	4 Paket	9.608.600
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Badan KesbangPol	4 Paket	12.390.000,00	3 Paket	22.390.000,00
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Badan KesbangPol	60 Dok	8.040.000,00	60 Dok	8.040.000,00
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Badan KesbangPol	4 Lap	11.220.000,00	4 Lap	21.220.000,00

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Badan KesbangPol	12 Lap	178.728.200,00	12 Lap	178.728.200,00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah perangkat daerah penunjang yang terpenuhi		100 %	26.400.000,00	100 %	96.000.000,00
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Badan KesbangPol	0 -	-	0 -	-
b	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Badan KesbangPol	30 Unit	26.400.000,00	5 Unit	46.000.000,00
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Badan KesbangPol	0 Unit	0,00	5 Unit	50.000,000
d	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Badan KesbangPol	- Unit	-	- Unit	-
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata - rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	106.670.000,00	100 %	127.670.000,00
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Badan KesbangPol	4 Lap	1.610.000,00	4 Lap	2.610.000,00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Badan KesbangPol	4 Lap	43,500,000	4 Lap	53,500,000
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Badan KesbangPol	4 Lap	61.560.000,00	4 Lap	71.560.000,00

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik		100 %	97.750.000,00	100 %	129.750.000,00
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Badan KesbangPol	4 Unit	24.000.000,00	4 Unit	34.000.000,00
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Badan KesbangPol	27 Unit	33.250.000,00	33 Unit	43.250.000,00
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor & bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	Badan KesbangPol	1 Unit	27.500.000,00	1 Unit	37.500.000,00
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Badan KesbangPol	1 Unit	13.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan		100 %	1.659.221.800,00	100 %	1.769.221.800,00
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pelaksanaan koordinasi di bidang ideology wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan		100 %	1.659.221.800,00	100 %	1.769.221.800,00

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pambauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pambauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Badan KesbangPol	100 Orang	53.928.800,00	375 Orang	63.928.800,00
b	Pembentukan Paskibraka	Jumlah PASKIBRAKA	Badan KesbangPol	70 Orang	1.605.293.000,00	70 Orang	1.705.293.000,00
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta buaya politik		100 %	1.241.440.265,00	100 %	1.260.771.265,00
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase capaian peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		100 %	1.241.440.265,00	100 %	1.260.771.265,00

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
a	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	Badan KesbangPol	1 Dok	57.821.000,00	1 Dok	67.821.000,00
b	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Badan KesbangPol	86 Orang	1.153.922.265,00	44 Orang	1.153.922.265,00

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
c	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Badan KesbangPol	4 Lap	29.697.000,00	4 Lap	39.028.000,00
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi		100 %	41.120.500,00	100 %	136.120.500,00
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi		108 Kelompok	41.120.500,00	108 Kelompok	136.120.500,00
a	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Badan KesbangPol	4 Lap	41.120.500,00	4 Lap	51.120.500,00

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		95 %	554.051.000,00	95 %	654.051.000,00
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta kerukunan umat beragama		100 %	554.051.000,00	100 %	654.051.000,00
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Badan KesbangPol	400 Orang	554.051.000,00	550 Orang	654.051.000,00
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial		100 %	1.367.986.100,00	100 %	1.577.985.600,00
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		100 %	1.367.986.100,00	100 %	1.577.985.600,00

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Badan KesbangPol	464 Orang	185.167.100,00	500 Orang	285.167.100,00
b	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Badan KesbangPol	4 Lap	26.617.500,00	4 Lap	36.617.500,00

Rencana Anggaran (Renja) Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
C	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Badan KesbangPol	4 Dokumen	1.156.201.500,00	4 Dokumen	1.256.201.000,00

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 Kabupaten Luwu Timur di maksudkan dengan harapan semoga pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan baik perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi lebih maksimal sehingga hasil dan dampak interfensi program, kegiatan dan Sub Kegiatan bisa terwujud demi terciptanya optimalisasi pembangunan di bidang Politik dan Peningkatan Kewaspadaan Dini di Daerah.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan di masa – masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur ini dapat menjadi dokumen perencanaan sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat demi Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Umat Beragama dan Stabilitas Politik di Masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 01 September 2025
KEPALA BADAN,



GUNTUR HAFID, S.Pd.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19710502 199208 1 001